



**RANCANGAN AKHIR (RANKHIR)  
RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus  
Telp. (0291) 438713  
E-mail : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir (RANKHIR) Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang disertai dengan proses koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang lain.

Diharapkan dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023, dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus.

Kudus, 01 Juli 2022

Plt. KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sekretaris



**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	30
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika .....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	57
BAB V PENUTUP .....	85

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ..... 14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus ..... 31
Tabel 2.3	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 32
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kudus ..... 41
Table 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 53
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 ..... 60
Tabel 3.3	Renja SKPD ..... 70

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya .....	2

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

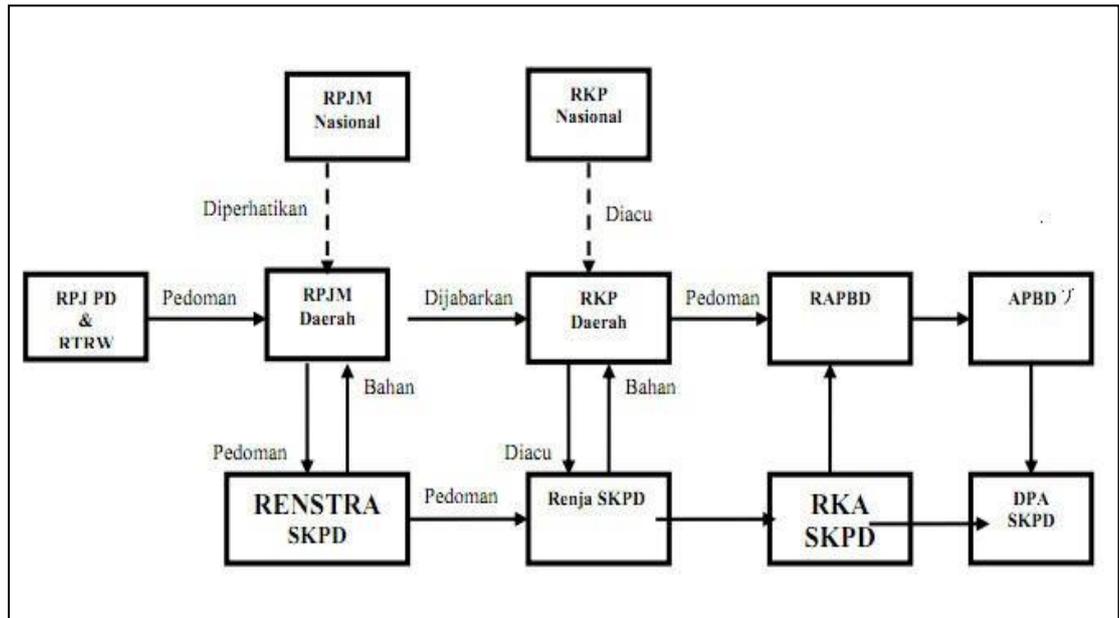
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. pasal 11 ayat 3 huruf b, disebutkan bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa pada tingkat perangkat daerah, dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang komunikasi dan informatika yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2023 5 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Prov Jateng Tahun 2000 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jateng Nomor 9) ;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jateng tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jateng Nomor 110);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2023 6 Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 58 Tahun 2021);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat .
- 2) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Tindak Lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok – pokok materi yang disampaikan antara lain :

- a. Realisasi rogram/ kegiatan/ sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .
- b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/ kegiatan/sb kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja rogram/kegiatan/ subkegiatan ;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

c. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab V. PENUTUP

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah beserta cap stempel Perangkat Daerah.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada empat tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2021, secara garis besar tercapai dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  1. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan target indikator persentase perangkat daerah yan telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 15%, tercapai 12% melalui 1 kegiatan , yaitu :
    - 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamann informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota.
  2. Kegiatan pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus .  
Indikator Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah mencapai 50% .

b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program pelayanan administrasi umum dengan target indikator program Survey kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah sebesar 85,87% telah tercapai melalui 8 kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan pencapaian indikator cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :

- 2) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program aplikasi informatika dengan target indikator tata kelola SPBE sebesar 2.43, kebijakan internal SPBE 3.12 dan layanan SPBE 3.39 telah tercapai melalui 2 kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program penyelenggaraan statistik sektoral dengan target indikator program Cakupan pelayanan data statistik sektoral sebesar 100% telah tercapai melalui 1 kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pada tahun 2021 tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang realisasi target kinerjanya melebihi dari target.
- d. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
- 1) Faktor utama terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah dukungan dana dari APBD
  - 2) Perencanaan program/kegiatan yang berkualitas
  - 3) Koordinasi yang baik dengan instansi terkait
- Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Perangkat Daerah.
- Pada program Program Aplikasi Informatika bisa dikatakan efektivitas anggarannya rendah dikarenakan pekerjaan Fiber Optic yang sedianya direncanakan untuk dilaksanakan tetapi tidak dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan beberapa peralatan penunjang jaringan fiber optik belum tayang di e katalog sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
  - Program penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki realisasi anggaran rendah yaitu 58,07% . Dalam hal ini berarti terdapat pekerjaan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dan sudah ada alokasi anggarannya tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan, bisa diartikan juga efektivitas anggaran pada program ini rendah. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Pemerintahan Kabupaten / Kota. Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, ada pekerjaan yang akan dilakukan pergeseran, tetapi dikarenakan Perubahan APBD 2021 tidak bisa dilaksanakan, maka anggaran yang ada tidak bisa dialihkan untuk pekerjaan yang direncanakan di Perubahan APBD 2021.

- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat.
- Perlu adanya pengadaan software pentest dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di perangkat daerah.;
  - penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan melaksanakan audit keamanan informasi;
  - Mengoptimalkan partisipasi Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik guna pelaksanaan desiminasi kebijakan pemkab dan responsif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - Percepatan Penyusunan Peraturan Bupati Kudus tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kudus yang mencantumkan kebijakan penggunaan sistem penghubung layanan instansi dan audit TIK;
  - Mengoptimalkan penyelenggaraan satu data di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus.

-



2	16	01.2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi capaian kinerja OPD, dokumen Pelaporan Kinerja OPD	3	dokumen		3	dokumen	3	dokumen	100					
2	16	01.2.01	01		Subkegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8	dokumen		8	dokumen	8	dokumen	100					
2	16	01.2.01	07		Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	3	dokumen		3	dokumen	3	dokumen	100					
2	16	01.2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan	29	dokumen		29	dokumen	29	dokumen	100					
2	16	01.2.02	01		Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22	orang		22	orang	25	orang	113.636					
2	16	01.2.02	02		Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100					
2	16	01.2.02	03		Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD	Jumlah pelaporan keuangan	12	bulan		12	bulan	12	bulan	100					
2	16	01.2.02			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah yang terbayar	1	tahun		1	tahun	1	tahun	100					
2	16	01.2.02	02		Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa jaminan milik daerah	1	tahun		1	tahun	1	tahun	100					
2	16	01.2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersosialisasinya kebijakan cukai kepada masyarakat	2400	orang		2400	orang	2400	orang	100					



2	16	01.2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, daftar nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), penilaian prestasi kerja pegawai yang tersusun sesuai standar	7	dokumen		7	dokumen	7	dokumen	100					
2	16	01.2.08	01		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4	jenis		4	jenis	4	jenis	100					
2	16	01.2.08	02		Subkegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	tahun		1	tahun	1	tahun	100					
2	16	01.2.08	03		Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	kegiatan		1	kegiatan	0	kegiatan	0					
2	16	01.2.08	04		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan	0	kegiatan		1	kegiatan	0	kegiatan	0					
2	16	01.2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan perkantoran	12	unit		12	unit	12	unit	100					



2	16	02.2.01	13		Subkegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	0	titik		5	titik	0	titik	0					
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Tata kelola SPBE	2.43			2.29		2.29		100					
2	16	03.2.01			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20	unit kerja		20	unit	20	unit	100					
2	16	03.2.01	03		Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	20	unit kerja		20	unit kerja	8	unit kerja	40					
2	16	03.2.02			Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	2	aplikasi		2	aplikasi	1	aplikasi	50					
2	16	03.2.02	03		Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	9	aplikasi		9	aplikasi	1	aplikasi	11.1111					
2	16	03.2.02	08		Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8	orang		8	orang	8	orang	100					
2	16	03.2.02	10		Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	41	orang		41	orang	41	orang	100					

2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	%		100	%	100	%	100					
2	20	02.2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	20	data		1	sektor	1	sektor	100					
2	20	02.2.01	01		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1	sektor		1	sektor	1	sektor	100					
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	24	%		15	%	12	%	80					
2	21	02.2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi	2	OPD		2	OPD	18	OPD	900					
2	21	02.2.01	03		Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang terlindungi	3	aplikasi		50	aplikasi	64	aplikasi	128					

2	21	02.2.01	04		Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi	2	aplikasi			2	layanan	2	layanan	100					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	84	indeks							83	indeks	83	indeks	98.81	
2	16	01.2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi capaian kinerja OPD, dokumen Pelaporan Kinerja OPD	3	dokumen							4	dokumen	4	dokumen	133.33	
2	16	01.2.01	01		Subkegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8	dokumen							8	dokumen	8	dokumen	100	
2	16	01.2.01	07		Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	3	dokumen							3	dokumen	3	dokumen	100	
2	16	01.2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan	12	bulan							12	bulan	12	bulan	100	
2	16	01.2.02	01		Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22	orang							27	orang	27	orang	122.73	
2	16	01.2.02	02		Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	bulan							12	bulan	12	bulan	100	

2	16	01.2.02	03		Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD	Jumlah pelaporan keuangan	12	bulan							12	bula n	12	bulan	100
2	16	01.2.02			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah yang terbayar	1	tahun							1	tahu n	1	tahun	100
2	16	01.2.02	02		Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa jaminan milik daerah	1	tahun							1	tahu n	1	tahun	100
2	16	01.2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja PD	83.5	indeks							83,5	inde ks	84	indeks	100.60
2	16	01.2.05	09		Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai peraturan perundang-undangan tentang ASN	27	orang							27	oran g	27	orang	100
2	16	01.2.05	10		Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konten yang dikelola	75	konten							75	kont en	75	konten	100
						Jumlah sosialisasi perundang-undangan	10	titik							75	kali	75	kali	750
						Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara	75	kali							10	titik	10	titik	13.33

2	16	01.2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah alat tulis kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perjalanan dinas	1	tahun							1	tahun	1	tahun	100
2	16	01.2.06	02		Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	40	jenis							40	jenis	40	jenis	100
2	16	01.2.06	04		Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1	tahun							1	tahun	1	tahun	100
2	16	01.2.06	05		Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7	jenis							7	jenis	7	jenis	100
2	16	01.2.06	06		Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	96	eksemplar							96	eksemplar	96	eksemplar	100
2	16	01.2.06	09		Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	1	tahun							1	tahun	1	tahun	100
2	16	01.2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan mebelair dan peralatan gedung kantor	12	unit							12	unit	12	unit	100
2	16	01.2.07	05		Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	19	unit							19	unit	19	unit	100
2	16	01.2.07	10		Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	2	unit							2	unit	2	unit	100

2	16	01.2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan SDM (laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, daftar nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), penilaian prestasi kerja pegawai yang tersusun sesuai standar	7	dokumen								7	doku men	7	dokumen	100
2	16	01.2.08	01		Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4	jenis								4	jenis	4	jenis	100
2	16	01.2.08	02		Subkegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	tahun								1	tahu n	1	tahun	100
2	16	01.2.08	03		Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	kegiatan								1	kegia tan	1	kegiatan	100
2	16	01.2.08	04		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan	1	kegiatan								1	kegia tan	1	kegiatan	100
2	16	01.2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12	unit								12	unit	12	unit	100
2	16	01.2.09	02		Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1	tahun								1	tahu n	1	tahun	100
2	16	01.2.09	06		Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9	jenis								9	jenis	9	jenis	100

2	16	02		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100	%							100	%	100	%	100
2	16	02.2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1	tahun							1	tahun	1	tahun	100
2	16	02.2.01	02	Subkegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1								1		1		100
					Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus	12	analisis berita							12	analisis berita	12	analisis berita	100
2	16	02.2.01	03	Subkegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan kegiatan Pemerintah Daerah	200	kegiatan							200	kegiatan	200	kegiatan	100
2	16	02.2.01	04	Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola	824	konten							824	konten	824	konten	100
2	16	02.2.01	06	Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani	20	OPD							15	permohonan	15	permohonan	75
					Jumlah bintek PPID pembantu	20	opd							20	opd	20	opd	100
					Jumlah monev PPID pembantu	1	kali							1	kali	1	kali	100
2	16	02.2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah konferensi pers	6	kali							6	kali	6	kali	100
					Jumlah pers tour	1	kali							1	kali	1	kali	100

2	16	02.2.01	08		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah FK Metra	4	kali							4	kali	4	kali	100
						Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan	2	pemangku kepentingan							2	pemangku kepentingan	2	pemangku kepentingan	100
2	16	02.2.01	10		Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten	60	orang							58	orang	58	orang	96.67
2	16	02.2.01	13		Subkegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara	8	unit							10	titik	10	titik	125
						Jumlah pengadaan sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik	8	unit							8	unit	8	unit	100
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Tata kelola SPBE	2.59								2.43	indeks	2.43	indeks	93.82
						Kebijakan internal SPBE									3.06	indeks	3.06	indeks	
						Layanan SPBE									2.7	indeks	2.7	indeks	
2	16	03.2.01			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20	unit kerja							20	unit kerja	20	unit kerja	100
2	16	03.2.01	03		Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	20	unit kerja							20	unit kerja	20	unit kerja	100

2	16	03.2.02			Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan e-government	10	aplikasi							10	aplikasi	10	aplikasi	100
						Presentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0.85								0.85		0.85		100
2	16	03.2.02	03		Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	2	aplikasi							2	aplikasi	2	aplikasi	100
2	16	03.2.02	07		Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prosentase Layanan SPBE	0.5								0.5		0.5		100
						Jumlah unsur SPBE									1	dokumen	1	dokumen	
2	16	03.2.02	08		Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8	orang							8	orang	8	orang	100
2	16	03.2.02	10		Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	6	orang							4	orang	4	orang	66.67
						Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	4	orang							6	orang	6	orang	150
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	cakupan pelayanan data statistik sektoral	100	%							100	%	100	%	100

2	20	02.2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi data statistik sektoral	20	data							20	data	20	data	100
2	20	02.2.01	01		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	dokumen							1	dokumen	1	dokumen	100
						Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral	0.8								0.8		0.8		100
2	20	02.2.01	02		Subkegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	60	orang							60	orang	60	orang	100
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18	%							18	%	18	%	100
2	21	02.2.01			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi	5	OPD							5	OPD	5	OPD	100

2	21	02.2.01	03	Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan keamanan informasi	3	aplikasi							3	aplikasi	3	aplikasi	100
2	21	02.2.01	04	Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah diaudit	2	aplikasi							2	aplikasi	2	aplikasi	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan indikator SPM (standar pelayanan minimal) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Analisis kinerja pelayanan dapat digunakan sebagai metode untuk mengetahui indikator-indikator kinerja yang telah dipenuhi maupun belum dipenuhi. Analisis kinerja tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Kudus**

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan  Analisis
				Th 2021 (n-2)	Th 2022 (n-1)	Th 2023 (n)	Th 2024 (n+1)	Th 2021 (n-2)	Th 2022 (n-1)	Th 2023 (n)	Th 2024 (n+1)	
1	2	3	4	12	6	7	8	11	12	14	14	15
1	Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2.56	2.68	2.87		2.53		2.87		
2	Nilai evaluasi SAKIP OPD			85.00	87.00	91.00		82.37		91.00		
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			78.00	79.00	81.00		88.44		81.00		
4	Cakupan pelayanan data statistik sektoral			100%	100%	100%		100%		100%		
5	Persentase fasilitasi persandian			15%	18%	24%		9%		24%		

**ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021**

(\* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			15,087,190		14,415,302		95.55	
		<b>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)</b>	<b>83,00</b>		<b>85.87</b>		<b>103.46</b>		
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>2,000</b>		<b>1,643</b>			
		<b>Jumlah dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi capaian kinerja OPD, dokumen pelaporan kinerja OPD</b>	<b>3,00</b>		<b>3.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			300		298		99.47	
		Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8,00		8.00		100.00		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,700		1,345		79.12	
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3,00		3.00		100.00		

<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,548,495</b>		<b>3,375,814</b>			
		<b>Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan</b>	<b>29,00 dokumen</b>		<b>29.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,418,495		3,252,398		95.14	
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22,00 Orang		25.00		113.64		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			120,300		115,380		95.91	
		Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12,00 Bulan		12.00		100.00		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9,700		8,037		82.85	
		Jumlah pelaporan keuangan	12,00 Dokumen		12.00		100.00		
<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,000</b>		<b>5,874</b>			
		<b>Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah</b>	<b>1,00 tahun</b>		<b>1.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6,000		5,874		97.90	
		Jumlah jasa jaminan milik daerah	1,00 Tahun		1.00		100.00		
<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>8,166,142</b>		<b>7,798,698</b>			
		<b>Tersosialisasinya kebijakan cukai kepada masyarakat</b>	<b>2.400,00 orang</b>		<b>2,400.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			8,166,142		7,798,698		95.50	
		Jumlah publikasi melalui baliho	24,00 kali		24.00		100.00		
		Jumlah publikasi melalui media cetak	130,00 kali		130.00		100.00		
		Jumlah sosialisasi ke masyarakat	60,00 kali		60.00		100.00		

<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>253,911</b>		<b>179,507</b>			
		<b>Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>12,00 bulan</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21,641		21,445		99.09	
		Jumlah alat tulis kantor	40,00 Jenis		40.00		100.00		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35,302		32,614		92.39	
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1,00 Tahun		1.00		100.00		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20,965		17,105		81.59	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7,00 Jenis		7.00		100.00		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10,800		9,060		83.89	
		Jumlah bahan bacaan	8,00 Jenis		8.00		100.00		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165,203		99,284		60.10	
		Jumlah perjalanan dinas	1,00 Tahun		1.00		100.00		
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>116,519</b>		<b>110,777</b>			
		<b>Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor</b>	<b>12,00 unit</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			26,225		21,875		83.41	
		Jumlah mebelair	4,00 Unit		0.00		0.00		

X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			90,294		88,902		98.46	
		Jumlah peralatan gedung kantor	8,00 Unit		8.00		100.00		
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,765,022</b>		<b>2,724,357</b>			
		<b>Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar</b>	<b>7,00 dokumen</b>		<b>7.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,990		1,986		99.80	
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4,00 Jenis		4.00		100.00		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2,760,920		2,722,371		98.60	
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,00 Tahun		1.00		100.00		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,712		0		0.00	
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00 Kegiatan		0.00		0.00		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			400		0		0.00	
		Jumlah jasa administrasi keuangan	1,00 Kegiatan		0.00		0.00		

<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>229,100</b>		<b>218,632</b>			
		<b>Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan perkantoran</b>	<b>12,00 unit</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			199,110		189,272		95.06	
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1,00 Tahun		1.00		100.00		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29,990		29,360		97.90	
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9,00 Jenis		9.00		100.00		
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>9,001,226</b>		<b>8,776,177</b>		<b>97.50</b>	
		<b>Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media</b>	<b>100,00 persen</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>9,001,226</b>		<b>8,776,177</b>			
		<b>Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>12,00 jenis</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			189,200		137,193		72.51	
		Jumlah opini dan aspirasi publik	2,00 Jenis		2.00		100.00		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			32,400		32,400		100.00	
		Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200,00 Kegiatan		191.00		95.50		

2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			7,566,607		7,499,390		99.11	
		Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media online, media elektronik, media luar ruang dan media tradisional	5,00 Kegiatan		5.00		100.00		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			32,900		29,557		89.84	
		Jumlah pengelolaan PPID	2,00 Kegiatan		2.00		100.00		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			1,137,119		1,034,738		91.00	
		Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi	60,00 Orang		60.00		100.00		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			43,000		42,900		99.77	
		Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi	5,00 Titik		0.00		0.00		
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>10,787,838</b>		<b>3,106,039</b>		<b>28.79</b>	
		<b>Tata kelola SPBE</b>	<b>2,29 Indeks</b>		<b>2.29</b>		<b>100.00</b>		
<b>2.16.03.2.01</b>	<b><i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			<b>10,263,222</b>		<b>2,751,679</b>			
		<b><i>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan</i></b>	<b>209,00 unit</b>		<b>209.00</b>		<b>100.00</b>		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			10,263,222		2,751,679		26.81	
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20,00 Unit Kerja		8.00		40.00		

2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>524,616</b>		<b>354,360</b>			
		<b>Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah</b>	<b>2,00 aplikasi</b>		<b>1.00</b>		<b>50.00</b>		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			195,837		61,197		31.25	
		Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	9,00 Aplikasi		1.00		11.11		
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			238,128		215,563		90.52	
		Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8,00 Orang		8.00		100.00		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			90,651		77,600		85.60	
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	41,00 Orang		41.00		100.00		
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>124,159</b>		<b>72,097</b>		<b>58.07</b>	
		<b>cakupan pelayanan data statistik sektoral</b>	<b>100,00 persen</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>124,159</b>		<b>72,097</b>			
		<b>Jumlah ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>1,00 sektor</b>		<b>1.00</b>		<b>100.00</b>		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			124,159		72,097		58.07	
		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1,00 Sektor		1.00		100.00		
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			<b>243,300</b>		<b>218,895</b>		<b>89.97</b>	
		<b>persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</b>	<b>15,00 persen</b>		<b>12.00</b>		<b>80.00</b>		

<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>243,300</b>		<b>218,895</b>			
		<b>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi</b>	<b>2,00 OPD</b>		<b>18.00</b>		<b>900.00</b>		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			200,000		199,320		99.66	
		Jumlah aplikasi yang terlindungi	50,00 Aplikasi		64.00		128.00		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			43,300		19,575		45.21	
		Jumlah layanan keamanan informasi	2,00 Layanan		2.00		100.00		
<b>JUMLAH</b>						<b>35,243,712</b>		<b>26,588,511</b>	

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD**

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Diantara isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Penguatan peran masyarakat melalui KIM;
- b. Penguatan keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik;
- c. Integrasi satu data;
- d. Pengamanan informasi dan persandian;
- e. Pemanfaatan sertifikat elektronik.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun dengan berdasar pada RPJMD selanjutnya disesuaikan dengan analisis perkembangan dinamika kebutuhan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga mengakomodir isu-isu penting yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Review terhadap rancangan awal RKPD selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Proses penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat diharapkan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD. Hal ini akan diperoleh pada saat dilaksanakannya Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan Musrenbang merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan OPD serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD untuk tahun anggaran 2023.

Secara khusus, tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan yang spesifik ditujukan terkait program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Kudus**

**SKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41,840,805,000				18,143,019,456	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			41,840,805,000				18,143,019,456	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	83,5 indeks	8,035,921,000	Kab. Kudus	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	83,5 indeks	14,860,705,156	

<b>2 16 01 2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (evaluasi renja triwulan)</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>2,200,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (evaluasi renja triwulan)</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>1,100,000</b>	
2 16 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8 dokumen	330,000	Kab. Kudus	Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8 dokumen	1,100,000	
2 16 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen	1,870,000	Kab. Kudus	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen		
<b>2 16 01 2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>12 bulan</b>	<b>4,336,989,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3,892,966,800</b>	
2 16 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22 orang	4,193,989,000	Kab. Kudus	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22 orang	3,788,302,000	
2 16 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	132,330,000	Kab. Kudus	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	89,000,000	

2	16	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaporan keuangan	12 bulan	10,670,000	Kab. Kudus	Jumlah pelaporan keuangan	12 bulan	15,664,800	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah yang terbayar</b>	<b>1 tahun</b>	<b>6,600,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah yang terbayar</b>	<b>1 tahun</b>	<b>6,000,000</b>	
2	16	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa jaminan milik daerah	1 tahun	6,600,000	Kab. Kudus	Jumlah jasa jaminan milik daerah	1 tahun	6,000,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>7,061,854,906</b>	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	61,855,026	
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9680 orang	6,999,999,880	

<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah alat tulis kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perjalanan dinas</b>	<b>1 tahun</b>	<b>268,428,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah alat tulis kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perjalanan dinas</b>	<b>1 tahun</b>	<b>272,822,150</b>	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	40 jenis	23,805,000	Kab. Kudus	Jumlah alat tulis kantor	40 jenis	38,444,000	
2	16	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	27,959,000	Kab. Kudus	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	35,362,750	
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	23,061,000	Kab. Kudus	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	22,015,400	
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	8 jenis	11,880,000	Kab. Kudus	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	8 jenis	10,800,000	
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas	1 tahun	181,723,000	Kab. Kudus	jumlah perjalanan dinas	1 tahun	166,200,000	

<b>2 16 01 2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>mlah pengadaan mebelair dan peralatan gedung kantor</b>	<b>12 unit</b>	<b>128,170,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>mlah pengadaan mebelair dan peralatan gedung kantor</b>	<b>12 unit</b>	<b>61,936,000</b>	
2 16 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	4 unit	28,847,000	Kab. Kudus	Jumlah mebelair	4 unit	10,573,000	
2 16 01 2.07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	8 unit	99,323,000	Kab. Kudus	Jumlah peralatan gedung kantor	8 unit	51,363,000	
<b>2 16 01 2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,041,524,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>			<b>3,272,579,200</b>	
2 16 01 2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4 jenis	2,189,000	Kab. Kudus	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4 jenis	3,500,000	
2 16 01 2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	3,037,012,000	Kab. Kudus	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	3,269,079,200	
2 16 01 2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 kegiatan	1,883,000	Kab. Kudus	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 kegiatan	-	
2 16 01 2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa adminstrasi keuangan	1 kegiatan	440,000	Kab. Kudus	Jumlah jasa adminstrasi keuangan	1 kegiatan	-	

<b>2 16 01 2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas</b>	<b>12 unit</b>	<b>252,010,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas</b>	<b>12 unit</b>	<b>291,446,100</b>	
2 16 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1 tahun	219,021,000	Kab. Kudus	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1 tahun	261,456,100	
2 16 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	32,989,000	Kab. Kudus	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	29,990,000	
<b>2 16 02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media</b>	<b>100%</b>	<b>14,674,454,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media</b>	<b>100%</b>	<b>2,211,930,000</b>	
2 16 02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan publikasi	1 tahun	14,674,454,000	Kab. Kudus	Jumlah pengelolaan informasi dan publikasi	1 tahun	2,211,930,000	

2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 analisis berita 15 pengaduan	208,120,000	Kab. Kudus	Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 analisis berita 15 pengaduan	117,500,000	
2	16	02	2.01	03	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200 kegiatan	35,640,000	Kab. Kudus	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200 kegiatan	313,200,000	
2	16	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			11,951,103,000	Kab. Kudus			1,350,973,000	
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bintek PPID pembantu Jumlah monev PPID Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani	20 OPD 1 kali 15 pemohon	91,190,000	Kab. Kudus	Jumlah bintek PPID pembantu Jumlah monev PPID Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani	20 OPD 1 kali 15 pemohon	75,676,600	
2	16	02	2.01	07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan		Kab. Kudus	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 layanan	188,264,700	

2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen		Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen	25,000,000	
2	16	02	2.01	10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	umlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten	60 orang	2,286,101,000	Kab. Kudus	umlah SDM pengelola informasi dan komunikasi publik yang kompeten	60 orang	-	
2	16	02	2.01	13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			102,300,000	Kab. Kudus	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7 unit	141,315,700	
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	<b>2,43 indeks</b>	<b>19,130,430,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	<b>2,43 indeks</b>	<b>1,070,384,300</b>	
2	16	03	2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik</b>	<b>20 unit kerja</b>	<b>18,600,978,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik</b>	<b>20 unit kerja</b>	<b>390,913,000</b>	

2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan sistem jaringan intra pemma	20 unit kerja	18,600,978,000	Kab. Kudus	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan sistem jaringan intra pemma	20 unit kerja	390,913,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah layanan egovernment</b>	<b>10 aplikasi</b>	<b>529,452,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah layanan egovernment</b>	<b>10 aplikasi</b>	<b>679,471,300</b>	
2	16	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	1 aplikasi	215,421,000	Kab. Kudus	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	1 aplikasi	172,766,500	
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				Kab. Kudus	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit	134,590,800	
2	16	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8 orang	214,315,000	Kab. Kudus	Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8 orang	-	

2	16	03	2.02	10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi (IKK LPPD)	3 orang	99,716,000	Kab. Kudus	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	372,114,000		
<b>2</b>	<b>20</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>136,575,000</b>				<b>109,598,600</b>		
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>cakupan pelayanan data statistik sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>136,575,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>cakupan pelayanan data statistik sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>109,598,600</b>		
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah publikasi data statistik sektoral</b>	<b>20 data</b>	<b>136,575,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah publikasi data statistik sektoral</b>	<b>20 data</b>	<b>109,598,600</b>	
2	20	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	30 data	136,575,000	Kab. Kudus	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	1 dokumen	93,586,000		

2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 orang	16,012,600	
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>267,630,000</b>				<b>52,033,010</b>	
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</b>	<b>18%</b>	<b>267,630,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</b>	<b>18%</b>	<b>52,033,010</b>	
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi</b>	<b>5 OPD</b>	<b>267,630,000</b>	<b>Kab. Kudus</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi</b>	<b>5 OPD</b>	<b>52,033,010</b>	

2	21	02	2.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi yang terlindungi	50 aplikasi	220,000,000	Kab. Kudus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	34,855,000	
2	21	02	2.01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi	2 layanan	47,630,000	Kab. Kudus	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 perangkat daerah	17,178,010	
<b>TOTAL</b>								<b>42,245,010,000</b>				<b>18,304,651,066</b>	

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

No	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Mengacu kepada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Pelaksanaan arah kebijakan prioritas pembangunan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disinkronkan dengan program-program yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, sesuai dengan sasaran pembangunan daerah “Meningkatnya penerapan Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)” yaitu sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah daerah kabupaten / kota;
- b. Program informasi dan komunikasi publik;
- c. Program Aplikasi Informatika;
- d. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- e. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati Kudus. Melalui penetapan tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja terukur apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mendukung Bupati Kudus mewujudkan misi kedua yaitu : Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Peningkatan Pelayanan Publik, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

1. Meningkatnya kualitas komunikasi dan informatika Indikator tujuannya :
  - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Indikator tujuannya :
  - Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Meningkatnya kinerja urusan statistik Indikator tujuannya :
  - Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan
4. Meningkatnya kinerja urusan persandian Indikator tujuannya :
  - Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian

Sasaran adalah kondisi-kondisi terukur jangka pendek yang direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah yang direncanakan akan selalu meningkat yang dapat diukur dengan indikator kinerja saasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan e-government serta informasi dan komunikasi publik yang optimal  
Indikator sasarnya :
  - a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Indikator sasarnya :
  - Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral Indikator sasarnya :
  - Prosentase ketersediaan data statistik sektoral berdasarkan urusan.

4. Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Indikator sarasannya :
  - Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2023, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 berasal dari Belanja Langsung sejumlah Rp. 18.360.542.826,- yang bersumber dari APBD murni dana DBHCHT.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan 3 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang terdiri dari 5 program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan 2 (dua) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 12 kegiatan, 36 sub kegiatan dibiayai dengan APBD dan 1 sub kegiatan dibiayai dengan dana DBHCHT.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program, kegiatan dan subkegiatan

Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian IKU Kepala Daerah yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

b. Uraian Garis besar Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 program yang terdiri atas 8 kegiatan terkait (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Total kebutuhan pagu indikatif dalam Rencana program dan kegiatan Rancangan Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun

2023 adalah sebesar Rp.18.310.542.826,- berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Kudus dan dana DBHCHT.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2024**  
**SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			18,148,911,216				19,631,728,336	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)			14,866,596,916			17,883,752,336	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumenevaluasi capaian kinerja OPD (evaluasi Renja Triwulan)			6,991,760			7,833,936	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	8 dokumen	1,100,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	1,210,000	

2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	3 Laporan	5,891,760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	6,623,936
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN</b>		<b>12 bulan</b>	<b>3,892,966,800</b>			<b>4,033,173,800</b>
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	27 orang/bu	3,788,302,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	3,931,702,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Dokumen	89,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	89,000,000
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Dokumen	15,664,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	12,471,800
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>umlah Jasa Jaminan Asuransi barang milik daerah yang terbayar</b>		<b>1 tahun</b>	<b>6,000,000</b>			<b>6,000,000</b>

2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Damaran	1 Dokumen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	6,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)</b>			<b>7,061,854,906</b>			<b>10,067,000,000</b>
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	3 orang	61,855,026	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	67,000,000
2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 orang	6,999,999,880	DBH CHT	83,5 Indeks	10,000,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah alat tulis kantor, baha logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan perjaanan dinas</b>		<b>1 tahun</b>	<b>272,822,150</b>			<b>300,104,000</b>
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	40 Paket	38,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	42,288,000

2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Paket	35,362,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	38,899,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	7 Paket	22,015,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	24,217,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	96 Dokumen	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	11,880,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 Laporan	166,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	182,820,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan mebelair dan peraatan gedung kantor</b>		<b>12 unit</b>	<b>61,936,000</b>			<b>68,129,600</b>
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	4 unit	10,573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11,630,300
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		8 unit	51,363,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56,499,300

<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3,272,579,200</b>				<b>3,069,920,000</b>
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	4 Laporan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,5 Index	3,850,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 tahun 0 Laporan	3,269,079,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,5 Index	1,385,149,000
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	4 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,5 Index	1,680,921,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	0 Laporan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,5 Index	0
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumah pemeliharaan kendaraan dinas</b>			<b>291,446,100</b>				<b>331,591,000</b>
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 Unit	261,456,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,5 Indeks	298,602,000

2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	9 Unit	29,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	83,5 Indeks	32,989,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>cakupa informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media</b>		<b>100%</b>	<b>2,211,930,000</b>			<b>1,099,999,000</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah pengelolaan informasi dan publikasi</b>		<b>1 tahun</b>	<b>2,211,930,000</b>			<b>1,099,999,000</b>
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah analisis berita tentang Kabupaten Kudus Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	12 analisis berita 100 %	117,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	129,250,000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	200 kegiatan	313,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	35,640,000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola Jumlah perencanaan media komunikasi publik	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	874 konten 1 dokumen	1,350,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	566,789,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bintek PPID pembantu Jumlah monev PPID pembantu Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	20 opd 1 kali 20 pemohon	75,676,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	83,244,000

2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah konferensi pers Jumlah pers tour	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	6 kali 1 kali	188,264,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	196,091,000
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah FK Metra Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	0 Dokumen 4 kali 2 pemangku kepentingan	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	27,500,000
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarpras pendukung informasi dan komunikasi publik Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik yang terpelihara	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	23 unit 5 titik	141,315,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	61,485,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>		<b>2,43 indeks</b>	<b>1,070,384,300</b>				<b>647,977,000</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah/ unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik</b>		<b>20 unit kerja</b>	<b>390,913,000</b>				<b>258,404,000</b>
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	20 unit kerja	390,913,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks	258,404,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan E government</b>		<b>10 aplikasi</b>	<b>679,471,300</b>				<b>389,573,000</b>

2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	4 aplikasi	172,766,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks 2,43 Indeks	133,158,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah unsur SPBE Prosentase Layanan SPBE	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	1 dokumen 50 %	134,590,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks 2,43 Indeks	214,050,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi (IKK LPPD)	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 orang	372,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks 2,43 Indeks	42,365,000
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>109,598,600</b>			<b>111,444,000</b>
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>cakupan pelayanan data statistik sektoral</b>		<b>100%</b>	<b>109,598,600</b>			<b>111,444,000</b>
2	20	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Publikasi data statistik sektoral</b>		<b>20 data</b>	<b>109,598,600</b>			<b>111,444,000</b>

2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen 1 dokumen 80 %	93,586,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	93,830,000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	60 orang	16,012,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	17,614,000
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>52,033,010</b>			<b>57,236,000</b>
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</b>		<b>18%</b>	<b>52,033,010</b>			<b>57,236,000</b>
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi</b>		<b>5 OPD</b>	<b>52,033,010</b>			<b>57,236,000</b>
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan keamanan informasi	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	3 aplikasi	34,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 %	38,340,000

2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah diaudit	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	2 aplikasi	17,180,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24 %	18,896,000
<b>TOTAL</b>									<b>18,310,542,826</b>			<b>19,800,408,336</b>

**LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH  
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PERIODE PELAKSANAAN : 2021**

(\* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2021) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2021 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=11/6*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,087,190		847,189		1,481,593		2,776,235		9,310,284		14,415,302		95.55	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	83,00	Indeks	85.62		0.00		0.00		0.25		85.87		103.46		

<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>2,000</b>		<b>718</b>		<b>0</b>		<b>827</b>		<b>98</b>		<b>1,643</b>			
		<b>Jumlah dokumen perencanaan OPD, dokumen evaluasi kinerja OPD, dokumen pelaporan kinerja OPD</b>	<b>3,00 dokumen</b>		<b>3.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			300		200		0		0		98		298		99.47	
		Jumlah dokumen perencanaan sesuai standar	8,00 dokumen		4.00		0.00		0.00		4.00		8.00		100.00		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,700		518		0		827		0		1,345		79.12	
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3,00 Dokumen		3.00		0.00		0.00		0.00		3.00		100.00		
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,548,495</b>		<b>714,350</b>		<b>686,053</b>		<b>1,208,795</b>		<b>766,617</b>		<b>3,375,814</b>			
		<b>Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi keuangan, dokumen pelaporan keuangan</b>	<b>29,00 dokumen</b>		<b>8.00</b>		<b>4.00</b>		<b>3.00</b>		<b>14.00</b>		<b>29.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,418,495		713,782		636,771		1,167,808		734,036		3,252,398		95.14	

		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	22,00 Orang		27.00		0.00		0.00		0.00		25.00		113.64		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			120,300		0		48,120		38,090		29,170		115,380		95.91	
		Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	12,00 Bulan		3.00		3.00		3.00		3.00		12.00		100.00		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			9,700		567		1,162		2,897		3,411		8,037		82.85	
		Jumlah pelaporan keuangan	12,00 Dokumen		3.00		3.00		3.00		3.00		12.00		100.00		
<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,000</b>		<b>0</b>		<b>5,874</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5,874</b>			
		<b>Jumlah jasa jaminan asuransi barang milik daerah</b>	<b>1,00 tahun</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>		<b>100.00</b>		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6,000		0		5,874		0		0		5,874		97.90	
		Jumlah jasa jaminan milik daerah	1,00 Tahun		0.00		1.00		0.00		0.00		1.00		100.00		

<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>8,166,142</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>804,020</b>		<b>6,994,678</b>		<b>7,798,698</b>			
		<b>Tersosialisasi nya kebijakan cukai kepada masyarakat</b>	<b>2,400, 00 orang</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>640.00</b>		<b>1,76 0.00</b>		<b>2,400 .00</b>		<b>100. 00</b>		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			8,166,142		0		0		804,020		6,994,678		7,798,698		95.5 0	
		Jumlah publikasi melalui baliho	24,00 kali		0.00		0.00		0.00		24.00		24.00		100. 00		
		Jumlah publikasi melalui media cetak	130,00 kali		0.00		0.00		10.00		120.0 0		130.0 0		100. 00		
		Jumlah sosialisasi ke masyarakat	60,00 kali		0.00		0.00		16.00		44.00		60.00		100. 00		
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>253,911</b>		<b>30,395</b>		<b>26,403</b>		<b>22,055</b>		<b>100,654</b>		<b>179,507</b>			
		<b>Jumlah ketersediaan barang habis pakai penunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>12,0 0 bulan</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		<b>12.00</b>		<b>100. 00</b>		

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21,641		6,008		4,227		9,350		1,860		21,445		99.09
		Jumlah alat tulis kantor	40,00 Jenis		10.00		10.00		10.00		10.00		40.00		100.00	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35,302		7,166		1,988		6,551		16,909		32,614		92.39
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1,00 Tahun		0.25		0.25		0.25		0.25		1.00		100.00	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20,965		2,398		9,344		2,394		2,969		17,105		81.59
		Jumlah barang cetak dan penggandaan	7,00 Jenis		2.00		2.00		2.00		1.00		7.00		100.00	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10,800		2,265		1,510		3,020		2,265		9,060		83.89
		Jumlah bahan bacaan	8,00 Jenis		8.00		0.00		0.00		0.00		8.00		100.00	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165,203		12,558		9,335		740		76,651		99,284		60.10
		Jumlah perjalanan dinas	1,00 Tahun		0.25		0.25		0.25		0.25		1.00		100.00	
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>116,519</b>		<b>0</b>		<b>92,627</b>		<b>0</b>		<b>18,150</b>		<b>110,777</b>		

		<b>Jumlah pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor</b>	<b>12,00 unit</b>		<b>0.00</b>		<b>9.00</b>		<b>0.00</b>		<b>3.00</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			26,225		0		21,875		0		0		21,875		83.41
		Jumlah mebelair	4,00 Unit		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			90,294		0		70,752		0		18,150		88,902		98.46
		Jumlah peralatan gedung kantor	8,00 Unit		0.00		5.00		0.00		8.00		8.00		100.00	
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,765,022</b>		<b>49,195</b>		<b>637,085</b>		<b>685,898</b>		<b>1,352,179</b>		<b>2,724,357</b>		
		<b>Jumlah dokumen pengelolaan SDM (Laporan rutin peremajaan pegawai bulanan, DUK, Daftar Nominatif, ABK, SKP, Standar Kompetensi Manajerial (SKM), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang tersusun sesuai standar</b>	<b>7,00 dokumen</b>		<b>2.00</b>		<b>1.00</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>		<b>7.00</b>		<b>100.00</b>	

X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,990		880		89		797		220		1,986		99.80
		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4,00 Jenis		1.00		1.00		1.00		1.00		4.00		100.00	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2,760,920		48,314		636,996		685,101		1,351,959		2,722,371		98.60
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,00 Tahun		0.25		0.25		0.25		0.25		1.00		100.00	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,712		0		0		0		0		0		0.00
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,00 Kegiatan		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			400		0		0		0		0		0		0.00
		Jumlah jasa administrasi keuangan	1,00 Kegiatan		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>229,100</b>		<b>52,532</b>		<b>33,552</b>		<b>54,640</b>		<b>77,908</b>		<b>218,632</b>		
		<b>Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara penunjang kelancaran operasional kegiatan perkantoran</b>	<b>12,0 Ounit</b>		<b>3.00</b>		<b>2.00</b>		<b>3.00</b>		<b>4.00</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>	

X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			199,110		46,482		27,902		48,095		66,793		189,272		95.06	
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan rutin bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1,00 Tahun		0.25		0.25		0.25		0.25		1.00		100.00		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29,990		6,050		5,650		6,545		11,115		29,360		97.90	
		Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	9,00 Jenis		2.00		2.00		3.00		2.00		9.00		100.00		
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>9,001,226</b>		<b>2,091,047</b>		<b>2,149,590</b>		<b>2,095,179</b>		<b>2,440,361</b>		<b>8,776,177</b>		<b>97.50</b>	
		<b>Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media</b>	<b>100,00 persen</b>		<b>0.00</b>		<b>100.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		

2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a</b>			9,001,226		2,091,047		2,149,590		2,095,179		2,440,361		8,776,177			
		<b>Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>12,00 jenis</b>		<b>4.00</b>		<b>4.00</b>		<b>1.00</b>		<b>3.00</b>		<b>12.00</b>		<b>100.00</b>		
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			189,200		4,493		0		600		132,100		137,193		72.51	
		Jumlah opini dan aspirasi publik	2,00 Jenis		1.00		1.00		0.00		0.00		2.00		100.00		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			32,400		2,402		0		19,198		10,800		32,400		100.00	
		Jumlah liputan kegiatan pemerintah daerah	200,00 Kegiatan		47.00		19.00		62.00		63.00		191.00		95.50		
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			7,566,607		1,806,985		1,958,755		1,710,335		2,023,315		7,499,390		99.11	

		Jumlah publikasi media cetak koran dan majalah, media online, media elektronik, media luar ruang dan media tradisional	5,00 Kegiatan		3.00		2.00		0.00	0.00		5.00		100.00		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			32,900		585		3,868		3,415		21,690		29,557		89.84
		Jumlah pengelolaan PPID	2,00 Kegiatan		1.00		0.00		0.00	1.00		2.00		100.00		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			1,137,119		233,683		186,967		361,631		252,457		1,034,738		91.00
		Jumlah SDM pengelola informasi dan komunikasi	60,00 Orang		57.00		3.00		0.00	0.00		60.00		100.00		
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			43,000		42,900		0		0		0		42,900		99.77
		Jumlah sarana prasarana pendukung informasi dan komunikasi	5,00 Titik		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>10,787,838</b>		<b>150,266</b>		<b>95,215</b>		<b>317,699</b>		<b>2,542,859</b>		<b>3,106,039</b>		<b>28.79</b>
		Tata kelola SPBE	2,29 Indeks		2.29		0.00		0.00	0.00		2.29		100.00		

2.16.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a</b>			10,263,222		79,794		42,539		207,717		2,421,629		2,751,679			
		<b>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan</b>	<b>209,00 unit</b>		<b>209.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>209.00</b>		<b>100.00</b>		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggara n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			10,263,222		79,794		42,539		207,717		2,421,629		2,751,679		26.81	
		Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terhubung jaringan fiber optik	20,00 Unit Kerja		8.00		0.00		0.00		0.00		8.00		40.00		

2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			524,616		70,472		52,676		109,982		121,229		354,360			
		<b>Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah</b>	<b>2,00 aplikasi</b>		<b>1.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>		<b>50.00</b>		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			195,837		6,381		0		3,945		50,870		61,197		31.25	
		Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	9,00 Aplikasi		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		11.11		
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			238,128		57,591		39,676		79,397		38,899		215,563		90.52	
		Jumlah SDM pengelola penghubung sistem layanan pemerintah	8,00 Orang		8.00		0.00		0.00		0.00		8.00		100.00		

2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			90,651		6,500		13,000		26,640		31,460		77,600		85.60
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan IT	41,00 Orang		0.00		0.00		41.00		0.00		41.00		100.00	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>124,159</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>159</b>		<b>71,938</b>		<b>72,097</b>		<b>58.07</b>
		<b>cakupan pelayanan data statistik sektoral</b>	<b>100,00 persen</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
<i>2.20.02.2.01</i>	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			<i>124,159</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>159</i>		<i>71,938</i>		<i>72,097</i>		
		<i>Jumlah ketersediaan data statistik sektoral</i>	<i>1,00 sektor</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>1.00</i>		<i>1.00</i>		<i>100.00</i>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			124,159		0		0		159		71,938		72,097		58.07

		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1,00 Sektor		0.00		0.00		0.00	1.00		1.00		100.00		
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			243,300		7,074		202,282		0		9,540		218,895		89.97
		persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	15,00 persen		12.00		0.00		0.00	0.00		12.00		80.00		
2.21.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			243,300		7,074		202,282		0		9,540		218,895		
		Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	2,00 OPD		1.00		1.00		16.00	0.00		18.00		900.00		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			200,000		0		199,320		0		0		199,320		99.66
		Jumlah aplikasi yang terlindungi	50,00 Aplikasi		31.00		19.00		14.00	0.00		64.00		128.00		

2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			43,300		7,074		2,962		0		9,540		19,575		45.21	
		Jumlah layanan keamanan informasi	2,00 Layanan		1.00		1.00		0.00		0.00		2.00		100.00		
JUMLAH				35,243,712		3,095,576		3,928,680		5,189,272		14,374,982		26,588,511			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)														113.25	75.44		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan sumber daya yang memadai dalam melaksanakan yang telah direncanakan																	
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 hanya untuk yang bersifat mendesak sehingga banyak pekerjaan yang rencananya di APBD perubahan akan digeser ke kegiatan lain tidak jadi terlaksana																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penentuan target program/kegiatan/sub kegiatan, agar benar-benar diperhitungkan antara pagu, jadwal dan target pada IKU OPD yang telah ditentukan.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan.																	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Selain itu, Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang ada ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Kudus, 01 Juli 2022

Plt. KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sekretaris



**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002